

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah

Pemerintah merupakan organisasi yang berkuasa dalam membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang, lembaga pemerintah sendiri terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Deddi dan Ayuningtyas, 2010). APBD Merupakan rencana kegiatan PEMDA yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan dan biaya (Halim, 2002).

PEMENDAGRI Nomor 13 Pasal 232 ayat (3) Tahun 2006 menjelaskan mengenai serangkaian prosedur, mengenai proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi keuangan serta melaporkan keuangan yang dicatat secara manual atau menggunakan komputer dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan. UU Nomor 32 Pasal 1 Tahun 2004 menerangkan tentang pernyataan dari Pemerintahan Daerah bahwa daerah diberikan wewenang yang luas dalam mengurus penyelenggaraan pemerintah yang berada diluar kewenangan pemerintah pusat, serta dalam pembuatan kebijakan daerah mengenai peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga kewajiban yang nyata dan bertanggungjawab.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin tugas dan kewajiban yang diberikan, sudah dilaksanakan dengan baik dan transparan (Ubaidillah dan Dian, 2019). Akuntabilitas adalah suatu aktivitas pemberian informasi dan *disclosure* kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan melaporkan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah. Pemerintah disini terdiri dari pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009).

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002), menjelaskan lima faktor pembentuk pemerintah yang akuntabel, dan harus diperhatikan oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*)

Akuntabilitas kejujuran yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang diberikan.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur administrasi, kecukupan informasi, dan sistem manajemen, sudah sesuai atau belum dalam pencapaian akuntabilitas.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang telah dicapai, serta mencari cara alternatif program yang dilakukan untuk memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk diberikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana secara ekonomi, efisien, dan efektif.

Pemerintahan yang baik harus memiliki koordinasi yang baik dan terarah. Peran pemerintah desa mewujudkan pemerintah yang Good Governance dengan cara melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban, dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

PEMENDAGRI NOMOR 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang keuangan Desa yang merupakan sumber dana desa untuk membantu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Beberapa kegunaan keuangan Desa meliputi belanja, pembiayaan serta pendapatan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa harus direncanakan dan direalisasikan dengan tepat sasaran. Proses pengelolaan keuangan desa berawal dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan pencatatan keuangan Desa

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

2.1.4 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Pemerintah Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015) menjelaskan bahwa perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa digunakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan tersebut dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dilakukan verifikasi. Selanjutnya Kepala Desa melakukan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa.

Penetapan RKP Desa yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan penyusunan APBDesa. Rencana mengenai kegiatan dan anggaran biaya yang sudah ditetapkan, bisa dijadikan sumber acuan dalam proses penganggaran selanjutnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini menjadi rencana tahunan pemerintah desa yang sudah ditetapkan sejak dulu. Proses Penyusunan APBDesa diawali dengan beberapa tahap berikut ini:

1. Pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa
2. Kedua, sekretaris Desa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada kepala Desa

3. Kemudian, RAPBDesa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati, disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan melalui camat, sekurang-kurangnya 3 hari setelah disepakati untuk dilakukan evaluasi;
5. Penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa dilakukan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
6. Setelah semua proses selesai, selanjutnya Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

2.1.5 Pelaksanaan Keuangan Desa

Prinsip umum yang harus ditaati dalam pelaksanaan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah Desa. Prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah Desa, dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015) menjelaskan mengenai tata cara pencairan dana Desa, yang dilakukan dengan penandatanganan Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bendahara Desa bisa menggunakan kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang

disimpan dalam kas desa sudah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Operasional kegiatan Desa yang berjalan lancar, karena pembayaran yang dilakukan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan. Penerimaan dan pengeluaran kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa.

2.1.6 Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa berkewajiban untuk melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015) menjelaskan tentang penatausahaan keuangan desa, yakni Bendahara Desa melakukan pencatatan pembukuan secara sederhana dan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan keuangan Desa dilakukan menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan Desa yang bersifat tunai dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Desa. Berbeda dengan penerimaan yang bersifat transfer, bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit, selanjutnya dicatat ke dalam Buku Bank. Pencatatan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Bendahara Desa melakukan pembukuan terhadap realisasi pendapatan Desa ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan ini digunakan untuk mengevaluasi mengenai realisasi pendapatan yang sudah diterima dan selanjutnya dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan belanja kegiatan Desa sangat perlu diperhatikan, cara belanja dalam kegiatan Desa ada 2 jenis yakni : tunai dan transfer. Belanja yang bersifat tunai dibuktikan dengan adanya kuitansi dan selanjutnya dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan kegiatan belanja yang bersifat transfer dicatat ke dalam Buku Bank.

Bendahara Desa dianjurkan untuk melakukan pencatatan perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang telah dilakukan. Pemotongan/pungutan pajak yang sudah dilakukan selanjutnya dicatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Selanjutnya Bendahara melakukan penyetoran atas kewajiban pajak ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan, dengan form Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian dilakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut ke dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran oleh bendahara Desa.

Pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing - masing, apabila pungutan pajak diberlakukan untuk desa maka dalam peraturan kepala daerah harus tercantum tentang

pemungutan pajak daerah. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak memiliki kewenangan.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa perlu dilakukan pencatatan, dan selanjutnya dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan tersebut dilakukan secara benar dan tertib, sehingga tidak ada kekeliruan.

4. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015) menjelaskan bahwa Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja. Akumulasi realisasi belanja bisa dilihat pada dokumen SPP terakhir.

5. Laporan Bendahara Desa

Bendahara Desa wajib melaporkan keuangan Desa dengan berbentuk LPJ. Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada Kepala Desa setiap bulan atau sekurangnya 10 hari setelah bulan pelaporan. Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, pada seluruh pencatatan. Akhir pencatatan pembukuan didampingi Kepala Desa.

6. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatatkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ke dalam buku kas pembantu kegiatan

dan laporan kegiatan, ketika kegiatan telah selesai. Pencatatan buku kas pembantu kegiatan dilakukan setelah menerima bukti dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang sudah dirupiahkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015) menjelaskan bahwa saldo yang masih berada di pelaksana kegiatan, disetorkan kepada Bendahara Desa. Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.

2.1.7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan keuangan Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodik semesteran dan tahunan, dan beberapa laporan juga diberikan ke BPD.

Berikut ini rincian laporan keuangan Desa:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, pada waktu yang sudah ditentukan yakni:

- a. Laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- b. Laporan realisasi APB Desa yang dilaporkan pada akhir tahun, waktu pelaporan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota

melalui camat. Laporan ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa.

3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa harus dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sekarang;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APB Desa tidak dievaluasi sesuai dengan proses peraturan desa tentang penetapan APBDesa. Berdasarkan PEMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang : APB Desa, pungutan , tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa.

2.1.8 Integritas

Integritas menjadi landasan bagi setiap orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Ikhsan, (2017) integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia orang lain. Integritas merupakan kesadaran mendalam atas sesuatu yang pernah dialami dengan cara melampaui kreativitas, nilai-nilai, ketrampilan-keterampilan intuitif dan emosi, serta daya analitis rasional (Sudarmanto, 2015). Dikatakan bahwa integritas merupakan karakter yang mendasar pada jiwa seseorang, dibuktikan dengan bersikap jujur, kemudian mampu mengendalikan emosi dan daya analitis rasional.

Faktor-faktor integritas yang digunakan untuk mengembangkan alat ukur integritas dalam penelitian, berasal dari konsep yang telah dikemukakan oleh psikologi humanistik Rogers (1961) yakni:

1. Jujur, yang berarti jika menerima dan menyampaikan perasaan serta perilaku harus sebenarnya. Seseorang yang memiliki nilai integritas yang tinggi akan bertindak dan menegur orang lain dengan memperhatikan berbagai hal sehingga tidak menyakiti.
2. Teguh, artinya tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, seseorang tidak mendapat suap dan ajakan dari orang lain untuk melakukan perbuatan curang meskipun mendapat imbalan.
3. Memiliki Self-Control yang kuat, suatu kemampuan individu dalam mengontrol atau memantau kinerja seseorang, agar sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki.

4. Memiliki self-esteem yang tinggi, kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai dengan moral dan keyakinan yang dimiliki.

Akuntabilitas pengelolaan dana dapat diwujudkan dengan adanya integritas pada kepala dan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2.1.9 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM, menjelaskan mengenai kemampuan seseorang, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang sudah diberikan dengan baik dan akuntabel. Menurut Boyatzis (1998) kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan efektif dalam pekerjaan. Sedangkan menurut Hornby dan Thomas (1989) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan kualitas manajer.

Kebijakan sumber daya manusia dan praktik yang sudah dijalankan, mampu menjadikan kekuatan untuk mendorong seseorang berperilaku jujur, konsisten dan memberikan pelayanan yang baik. Menurut penelitian Widyatama et al., (2017) indikator yang digunakan ada 3 yakni : pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi SDM menjadi suatu faktor yang penting karena dengan memiliki anggota yang berkompeten menjadikan pemerintah yang akuntabel, sehingga dengan kompetensi tersebut seseorang akan lebih mudah untuk berkarya dan menjalankan wewenang yang diberikan dengan efektif dan efisien.

2.1.10 Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan suatu lembaga dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yang berhubungan dengan segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002). Transparansi berarti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat (Made dan Ketut, 2019). Pemerintah yang lebih transparan mampu untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, maka transparan menjadi hal yang penting dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini menggunakan 3 indikator yakni : kebijakan, ketepatan waktu dan keterbukaan informasi kepada publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Dana, P dan Hasniati, D (2016)	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penelitian Kualitatif	Penerapan prinsip-prinsip akuntansi (X1) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pengawasan kegiatan (X2) penerapan prinsip akuntabilitas: transparan dan kompetensi (X3) dan model akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan

					program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis.
2.	Sugiarti, E dan Yudianto, I (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Regresi linier berganda	Sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), variabel partisipasi penganggaran (X3) dan kualitas laporan keuangan (Y)	Mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa semakin bagus. Mengindikasikan penggunaan teknologi informasi berupa computer dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen. Mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran sudah sangat baik
3.	Widyatama et al (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Penelitian Kuantitatif	Kompetensi aparatur (X1), sistem pengendalian (X2) dan akuntabilitas (Y)	Menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), menunjukkan bahwa sistem

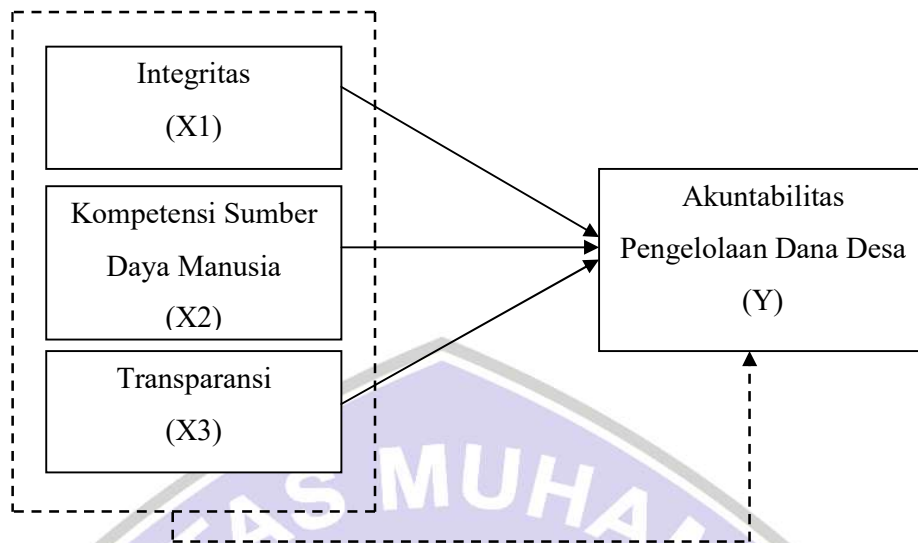
					pengendalian aparaturnya dari Pemerintah Desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD Masyarakat
4.	Ubaidillah, M dan Arumsari, D (2018)	Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode kuantitatif dengan PLS	Tata kelola (X1) dan integritas (X2) akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Tata kelola pemerintahan desa baik, terkonsep, teratur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undang maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel, aparaturnya pemerintah desa mempunyai sikap integritas yang tinggi dan berkomitmen terhadap aturan-aturan yang ada di pemerintah desa sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik dan akuntabel.

5.	Ubaidillah, M dan Arumsari, D (2019)	Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM dan Integritas sebagai Variabel Intervening	Penelitian Kuantitatif	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Tata Kelola, Profesionalisme dan Integritas	Aparatur pemerintahan desa yang memiliki SDM profesional akan mudah dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa yang baik. Tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Integritas
6.	Yoga, I.M dan Putra, D (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Regresi linier berganda	Akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) efektivitas pengelolaan dana desa (Y)	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada tingkat efektivitas pengelolaan dana desa.

Sumber : Ringkasan Penelitian diolah tahun 2020

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga variabel bebas yaitu integritas, kompetensi SDM, dan transparansi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :



Keterangan :

———— = Garis Parsial

----- = Garis Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 2.1 dijelaskan bahwa integritas, kompetensi SDM dan transparansi pemerintahan desa memiliki pengaruh dalam kemampuan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya pengelolaan dan pelaporan dana desa. Pertanggungjawaban finansial yang meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD).

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik perlu diperhatikan tentang integritas dalam pembuatan anggaran dan pelaporan keuangan, selanjutnya SDM yang dimiliki pemerintah harus yang berkompetensi tinggi, supaya mampu menyusun anggaran dan laporan keuangan secara efektif, serta harus lebih transparan kepada publik

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Integritas merupakan hal paling penting bagi seseorang, karena dengan adanya kejujuran seseorang akan lebih dipercaya dan bekerja dengan baik tanpa ada campur tangan pihak lain. Ubaidillah & Arumsari,(2018) menjelaskan bahwa integritas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai integritas yang baik akan mewujudkan pemerintah yang akuntabel, didukung dengan kejujuran yang tinggi, keteguhan dalam menjalankan wewenang, mampu untuk mengontrol emosi serta memiliki kepercayaan yang tinggi.

H₀₁ :Integritas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a1} :Integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sebuah sistem pemerintahan memiliki dasar yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian sistem pemerintah yang akuntabel yakni memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Sugiarti & Yudianto, (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, sebesar persentase 19,81%. Sedangkan penelitian

yang Widyatama et al., (2017) bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan pendapat tersebut menjadikan peneliti akan membuktikan apakah terdapat pengaruh kompetensi SDM.

H₀₂ :Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a2} :Kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan hal yang perlu dilakukan organisasi sektor publik. Keterbukaan sebuah organisasi dalam segala bentuk aktivitas mencerminkan kepribadian dari sistem pemerintahan organisasi tersebut.

Penelitian Dana & Hasniati, (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh V.Devina, (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat desa memaknai transparansi dan akuntabilitas, tidak dengan standar transparansi yang tinggi. Masyarakat lebih menekankan sisi gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penjelasan dari penelitian sebelumnya, menjadikan peneliti untuk membuktikan pengaruh dari transparansi.

H₀₃ :Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H_{a3} :Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pengaruh Integritas, Kompetensi SDM dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menciptakan sistem pemerintah yang akuntabel sangatlah penting, karena sistem pemerintah yang baik menjadikan Negara lebih berdaulat dan berkualitas. Pengelolaan dana desa menjadi salah satu alasan dalam menciptakan sistem pemerintah yang baik. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni nilai integritas yang tinggi, kompetensi SDM, dan transparansi. Integritas yang dimiliki setiap perangkat Desa merupakan landasan utama dalam menciptakan karakter atau pribadi yang baik. Tingkat integritas seseorang yang tinggi mampu mempermudah untuk mengontrol emosi dan berfikir rasional. Pemerintah harus memiliki SDM yang berkompeten, karena tingkat kompetensi yang tinggi menjadikan anggota pemerintah lebih berkualitas dalam membuat anggaran dan laporan kegiatan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan.

Transparansi adalah hal yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas ini seperti pada pengelolaan dana desa, jika pemerintah desa lebih transparan terhadap dana desa, maka tidak akan ada permasalahan atau penyelewengan. Masyarakat akan lebih percaya dengan kinerja para perangkat desa.

**H₀₄ :Integritas, Kompetensi SDM dan Transparansi tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

**H_{a4} :Integritas, Kompetensi SDM dan Transparansi
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

